



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN ANGGARAN 2024

Komplek Perkantoran Tanjung
Agung Kec, Mempura, Kab. Siak,
Prov. Riau



diskominfo@mail.siakkab.go.id

www.diskominfo.siakkab.go.id



KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan Rahmatnya, sehingga Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 serta APBD tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan berisi mengenai keberhasilan/ kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi masa mendatang.

Akhirnya kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Siak Sri Indrapura, 27 Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SIAK



ROMY LESMANA DERMAWAN, AP. M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740202 199303 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2024 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum telah sesuai dengan yang ditargetkan. Rata-rata capaian sasaran strategis tersebut adalah 128,79%. Total APBD Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar sebesar Rp. 35.814.344.280,00 dan pada P-APBD menjadi Rp. 43.652.819.872,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.428.949.533,- persentase capaian realisasi anggaran sebesar 58,25%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah 5

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi 5

1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah 21

1.7 Aspek Strategis 26

1.8 Isu-isu Strategis (*Strategic Issued*) 26

1.9 Sistematika Penyajian 28

BAB II 29

PERENCANAAN KINERJA 29

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 29

2.2 Strategi dan Kebijakan 31

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 34

2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024 35

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 36

2.6 Dukungan Anggaran 37

BAB III 42

AKUNTABILITAS KINERJA 42

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 43

3.2 Realisasi Anggaran 80

BAB IV 86

PENUTUP 86

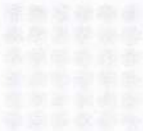
DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon.....	21
Tabel 2 - Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	22
Tabel 3 - Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 4 - Jumlah Pegawai Kontrak.....	24
Tabel 5 - Data Kendaraan Dinas Operasional.....	25
Tabel 6 - Nilai Aset.....	26
Tabel 7 - Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	31
Tabel 8 - Strategi dan Arah Kebijakan.....	33
Tabel 9 - Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
Tabel 10 - Rencana Kinerja Diskominfo Kabupaten Siak	35
Tabel 11 - Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Siak	37
Tabel 12 - Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Siak.....	41
Tabel 14 - Skala Nilai Peringkat Kinerja	42
Tabel 15 - Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	44
Tabel 16 - Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2024.....	48
Tabel 17 - Pencapaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026	48
Tabel 18 - Pencapaian Kinerja yang mengacu pada target jangka menengah Renstra	49
Tabel 19 - Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional	49
Tabel 20 - Capaian Kinerja Pengelolaan Opini Publik dan Komunikasi Publik Tahun 2024	51
Tabel 21 - Capaian Kinerja Pengelolaan Opini Publik dan Komunikasi Publik Tahun 2024	51
Tabel 22 - Capaian kinerja pengelolaan Informasi Publik dan Statistik.....	52
Tabel 23 - Capaian kinerja pengelolaan kehumasan.....	52
Tabel 24 - Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang ada s.d 2024.....	61
Tabel 25 - Domain dan Sub Domain	66
Tabel 26 - Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2023	77
Tabel 27 - Analisis Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	78
Tabel 28 - Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	80
Tabel 29 - Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Realisasi Tahun 2024.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Stuktur Organisasi 7



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada penyelenggaraan Pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan Masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di Masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari Masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada Masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme Komunikasi dengan Informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (*information of technology*).

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8). Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang TIK sejalan dengan tujuan Pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (*elektronik*) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi.

Hal ini sangat terkait bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang *good governance*, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. *E-Government* didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara Pemerintah dengan Masyarakat dan



pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Salah satu amanah dari Dinas Komunikasi dan informatika adalah mengintegrasikan sistem menuju smart city dengan melakukan sinergitas dalam tata kelola informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika fokus pada ekosistem TIK smart city yang artinya Dinas Kominfo tidak hanya mengambil data – data internal Pemerintahan ataupun Dinas – dinas tapi juga mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan layanan yang diluar Pemerintahan. Pembangunan komunikasi dan informatika merupakan gabungan antara pengembangan infrastruktur memadai dan tersedianya layanan komunikasi dan informasi yang merata di semua wilayah tidak terkecuali di pedesaan. Selain Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo juga melaksanakan dua urusan lagi yaitu Urusan Persandian dan Urusan statistik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

- 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 8 Seri A);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
 13. Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 103);
 14. Peraturan Bupati Siak Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 18);
 15. Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 125);
 16. Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 131).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian di Kabupaten Siak.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak selama Tahun Anggaran 2024;
- 2) Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 3) Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya Pemerintah yang baik dan terpercaya.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Pengelolaan Teknologi, Informasi, Komunikasi, urusan Persandian dan Urusan Statistik serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan system Informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan intranet/internet, pengelolaan informasi dan publikasi, penyampaian data statistik serta pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi..

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Siak diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, yakni

melaksanakan tugas urusan Pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

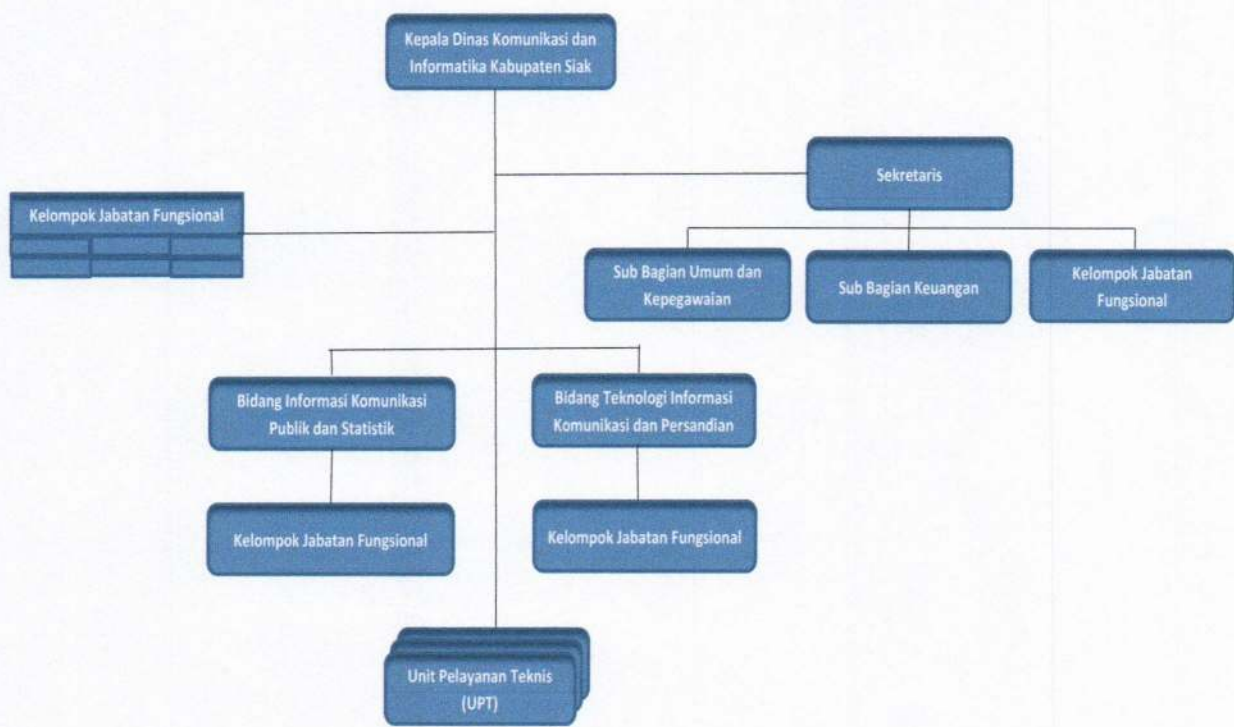
- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- 2) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Informasi Publik;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Komunikasi Publik;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Aplikasi dan Informatika;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Persandian dan e-Government;
- 7) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak didukung oleh manajemen dengan perangkat-perangkat organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional (Fungsional Perencana)
- 3) Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Siak



Gambar 1 - Stuktur Organisasi

Adapun uraian tugas dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Siak

Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan criteria yang telah ditetapkan;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Informasi Publik;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Komunikasi Publik;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Aplikasi dan Informatika;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Persandian dan e-Government;
- g. Pembinaan terhadap pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatusahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan Masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- d. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan keindahan, keamanan, ketertiban kantor;
- e. Melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu,

- 
- kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, penilaian kinerja pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
- g. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
 - h. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan Masyarakat;
 - i. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1.2 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana operasional program kerja dan anggaran Subbagian Keuangan;
- b. Membuat daftar usulan kegiatan;
- c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 
- e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
 - i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 - j. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - l. Mengevaluasi hasil program kerja;
 - m. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
 - n. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
 - o. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik

Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengelolaan urusan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten/Kota; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian

Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengelolaan urusan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan Persandian di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;

- 
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan Pemerintahan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah kabupaten;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan Pemerintahan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan system komunikasi intra Pemerintah kabupaten;
 - g. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan Pemerintahan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, layanan system komunikasi intra Pemerintah kabupaten;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan insfrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan pablik dan Pemerintahan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah kabupaten;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet,

layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan Pemerintahan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegritas, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;

- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi kabupaten; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Fungsi Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Diskominfo Kabupaten Siak

a. Sub Koordinator Perencanaan, menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan perencanaan;
- 2. Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan;
- 3. Penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
- 4. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan, dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- 5. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;
- 6. Inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja; dan
- 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Perencanaan.

b. Sub Koordinator Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi:

- 
1. Penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
 2. Pengumpulan pendapat umum (survei, jejak pendapat);
 3. Pengolahan aduan Masyarakat di Kabupaten;
 4. Penyelenggaraan layanan pemantuan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah daerah;
 5. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah daerah;
 6. Penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah;
 7. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 8. Penyelenggaraan pembuatan konten lokal;
 9. Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal;
 10. Pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah daerah dan non Pemerintah daerah di kabupaten; dan
 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik.
- c. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik
1. Penyelenggaraan layanan pengelolaan informasi publik dan keterbukaan informasi publik;
 2. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengolahan data statistik sektoral;
 3. Pengumpulan dan penyiapan data serta analisis data-data hasil pelaksanaan pembangunan;
 4. Penghimpunan data statistik pembangunan daerah dan menyusun buku saku hasil pembangunan daerah;
 5. Penyiapan dokumentasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
 6. Penyiapan bahan pengolahan data statistik hasil survei bidang sosial yang mendapatkan rekomendasi BPS;

- 
7. Penyiapan bahan pengolahan data statistik hasil survei bidang ekonomi yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 8. Penyiapan bahan pengolahan data statistik hasil survei bidang politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik.
- d. Sub Koordinator Pengelolaan Kehumasan, mempunyai tugas:
1. Perencanaan dan penyusunan anggaran Kehumasan;
 2. Pembuatan standar operasional dan prosedur Kehumasan;
 3. Penyelenggaraan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
 4. Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten;
 5. Penyelenggaraan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 6. Pengembangan sumber daya komunikasi publik dan kehumasan di Kabupaten Siak;
 7. Menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga kehumasan lainnya melalui forum koordinasi kehumasan;
 8. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan Pemerintahan dan swasta;
 9. Pemberian hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media massa;
 10. Penyusunan materi ringkasan pemberitaan media massa;
 11. Pelaksanaan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup Pemerintah Kabupaten Siak; dan
 12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Pengelolaan Kehumasan.
- e. Sub Koordinator Bidang Pengelolaan e-Government, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan audit TIK;

- 
2. penyelenggaraan layanan pengembangan Bussiness Process Re-engineering pelayanan di lingkungan Pemerintahan dan non Pemerintah (Stakeholder Smart City);
 3. penyelenggaraan layanan Sistem Informasi Smart City;
 4. penyelenggaraan layanan pendaftaran mama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintahan;
 5. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
 6. penyelenggaraan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten;
 7. penyelenggaraan layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non Pemerintah;
 8. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas Masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City; dan
 9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Pengelolaan e-Government.
- f. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi, menyelenggarakan fungsi:
1. penyelenggaraan layanan pengembangan aplikasi Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 2. pemeliharaan aplikasi kePemerintahan dan publik;
 3. penetapan standar format data dan infomasi, walidata dan kebijakan;
 4. penyelerrggaraari recovery data dan informasi;
 5. pegelolaan data elektronik Pemerintahan dan non Pemerintahan;
 6. penyelenggaraan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
 7. penyelenggaraan layanan interoperabilitas;

- 
8. penyelenggaraan interkoneksi layanan publik dan kePemerintahan;
 9. penyelenggaraan layanan pusat Application Programming Interface (API) daerah; dan
 10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi.
- g. Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Persandian, menyelenggarakan fungsi:
1. penyelenggaraan dan pengembangan Data Center dan Disaster Recovery Center,
 2. pengembangan dan inovasi infrastruktur dan teknologi informatika terkait implementasi e-Government;
 3. penyelenggaraan Government Cloud Computing;
 4. pengelolaan akses internet Pemerintah dan publik;
 5. penyelenggaraan layanan filtering konten negatif;
 6. penyelenggaraan layanan interkoneksi jaringan intra Pemerintah;
 7. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
 8. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten serta menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
 9. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional perrgelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;

- 
10. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah daerah serta pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah daerah;
 11. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 12. pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur, teknologi informatika dan persandian;
 13. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
 14. perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
 15. perencanaan kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
 16. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/ vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
 17. pengamanan informasi elektronik serta pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
 18. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
 19. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

20.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Persandian.

1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan Informatika didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 31 orang Pegawai Negeri Sipil dan 124 (seratus dua puluh empat) Orang tenaga kontrak, dengan uraian sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2023 adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang pegawai.

1. Pejabat Struktural

Berdasarkan Eselon Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak berdasarkan eselon Tahun 2024

Eselon				Jumlah (orang)
I	II	III	IV	
-	1	3	2	6

Tabel 1 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

2. Pangkat dan Golongan

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

No	Pangkat/Golongan	Tahun 2023
1	Pembina Utama Madya / IV d	0
2	Pembina Utama Muda / IV c	1
3	Pembina Tingkat I / IV b	0
4	Pembina / IV a	3
5	Penata Tingkat I / III d	6
6	Penata / III c	4
7	Penata Muda Tingkat I / III b	6
8	Penata Muda / III a	3
9	Pengatur Tingkat I / II d	0
10	Pengatur / II c	3
11	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1
12	Pengatur Muda / II a	0
13	Juru / I c	0
14	PPPK / Golongan (IX)	2
JUMLAH		29

Tabel 2 - Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat dan Golongan

3. Pendidikan Formal :

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Pasca Sarjana	8 orang
2	Sarjana	14 orang
3	Diploma	3 orang

4	SLTA	3 orang
5	SLTP	0 orang
6	SD	1 orang
Total		29 Orang

Tabel 3 - Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

b. Pegawai Kontrak :

Jumlah Pegawai Kontrak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2024 adalah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Pelaksana Adm/Keuangan	6
2	Operator Komputer	23
3	Tenaga Administrasi Pembantu Pejabat Perencanaan	1
4	Tenaga Operator Website	4
5	Tenaga Operator Media Center	9
6	Tenaga Operator PPID	3
7	Tenaga Programmer Kepala/ Ahli	1
8	Tenaga Programmer Middle/ Lanjutan	5
9	Tenaga Programmer Pemula	5
10	Petugas Televisi Siak	19
11	Petugas Radio Penyiaran Kabupaten	13
12	Design Grafis / Teknisi Jaringan	5
13	Tenaga Kebersihan	4

No	Jabatan	Jumlah
14	Petugas Supir Kantor	2
15	Tenaga Keamanan	4
16	Command Center	3
17	Call Center	8
18	CCTV	4
19	Kehumasan	4
20	Disabilitas	1
	Total	124 Orang

Tabel 4 - Jumlah Pegawai Kontrak

2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Penunjang lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak adalah berupa aset sarana dan prasarana, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Data Kendaraan Dinas Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak

No	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan	Jumlah	Kondisi Barang
1	Sepeda Motor (BM 2020 SP)	2000	1 unit	Baik
2	Sepeda Motor (BM 4179 S)	2003	1 unit	Baik
3	Sepeda Motor (BM 3608 S)	2007	1 unit	Baik
4	Station Wagon (BM 42 S)	2008	1 unit	Baik
5	Station Wagon (BM 1346 S)	2010	1 unit	Baik
6	Station Wagon (BM 1373 S)	2012	1 unit	Baik
7	Sepeda Motor (BM 3851 SP)	2012	1 unit	Baik
8	Sepeda Motor (BM 3858 S)	2012	1 unit	Baik
9	Sepeda Motor (BM 3857 S)	2012	1 unit	Baik

No	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan	Jumlah	Kondisi Barang
10	Station Wagon (BM 1280 S)	2013	1 unit	Baik
11	Sepeda Motor (BM 5504 S)	2013	1 unit	Baik
12	Station Wagon (BM 1549 S)	2015	1 unit	Baik
13	Station Wagon (BM 1167 S)	2010	1 unit	Kurang Baik
17	Sepeda Motor (BM 3061 S)	2001	1 unit	Baik
18	Station Wagon (BM 1515 S)	2015	1 unit	Baik
19	Mini Bus (BM 1591 S)	2022	1 unit	Baik
Total			16 unit	

Tabel 5 - Data Kendaraan Dinas Operasional

Tabel 1.5

Nilai Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak

No	Uraian	Tahun 2023
	Tanah	1.992.900.000,00
1	Tanah	1.992.900.000,00
	Peralatan dan Mesin	16.522.287.893,09
2	Alat Besar	529.878.323,00
3	Alat Angkutan	2.470.111.790,35
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.122.621,54
5	Alat Pertanian	1.400.000,00
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.103.237.611,10
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4.209.612.529,71
8	Alat Laboratorium	32.356.127,00
9	Komputer	5.165.417.690,40
10	Alat Keselamatan Kerja	1.151.200,00
	Gedung dan Bangunan	3.311.983.287,05
11	Bangunan Gedung	3.140.554.667,77
12	Tugu Titik Kontrol/Pasti	171.428.619,28

No	Uraian	Tahun 2023
	Aset Lainnya	8.023.843.071,67
12	Aset Tidak Berwujud	499.860.150,50
13	Aset Lain-Lain	7.523.982.921,17
	Total	29.851.014.251,81

Tabel 6 - Nilai Aset

1.7 Aspek Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian memiliki beberapa aspek strategis yaitu perkembangan teknologi informasi dalam membangun Pemerintahan berbasis e-gov menjadikan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan informasi dan komunikasi yang terpadu, efektif dan efisien, menyediakan dan menyebarluaskan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik kepada Masyarakat, Pengumpulan dan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral, serta Pengamanan Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Siak sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan untuk dapat diakses dan dimanfaatkan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhannya melalui media cetak, media penyiaran, media daring, media sosial dan media luar ruang.

1.8 Isu-isu Strategis (*Strategic Issued*)

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam mendukung pencapaian visi, misi kepala daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian di Kabupaten Siak dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1) Transformasi Digital:

- Percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan dan masyarakat.
- Pengembangan layanan publik digital yang terintegrasi dan mudah diakses.

2) Infrastruktur TIK:

- Pemerataan akses internet berkualitas, terutama di daerah terpencil.
- Peningkatan infrastruktur jaringan dan pusat data.

3) Keamanan Siber:

- Peningkatan perlindungan terhadap ancaman siber dan kebocoran data.
- Peningkatan kesadaran keamanan siber di kalangan masyarakat.

4) Literasi Digital:

- Peningkatan kemampuan digital masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara positif.
- Pemberantasan hoaks dan disinformasi melalui edukasi digital.

5) Keterbukaan Informasi Publik:

- Optimalisasi penyediaan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.

6) Statistik Sektorial

- Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan *up dating* data statistik sektoral yang belum optimal

1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bab I – Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..
2. Bab II – Perencanaan Kinerja, Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran:

- Perjanjian Kinerja Esselon II
- Lain-lain yang dirasa perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu”, sedangkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian Visi tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Melalui Penerapan *E-Government*.
- 2) Mewujudkan Kualitas SDM yang Agamis, Unggul, Sehat dan Cerdas.
- 3) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Inklusif.
- 4) Mewujudkan Perekonomian Yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, Umkm, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sektor Produktif Lainnya.
- 5) Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Pemajuan Budaya Melayu.

Misi pembangunan Kabupaten Siak untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak adalah Misi 1 (Kesatu) Kabupaten Siak, yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah Melalui Penerapan *E-Government*, dengan Tujuan, (1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintah Daerah, sedangkan Sasaran, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Ini merupakan acuan Diskominfo Kabupaten Siak dalam merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sesuai tugas dan fungsi dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang akan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati untuk Misi Kesatu tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak sesuai dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Siak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Diskominfo Kabupaten Siak Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja/Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Berbasis e-Government	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	82	82	84	86	88	90
			Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	-	11%	46%	81%	93%	100%
		Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	1,9	2,0	2,5	2,9	3,02	3,4

		Government menuju Kabupaten Siak sebagai <i>Smart City</i>	Elektronik (SPBE)						
			Persentase perangkat daerah yang mengimple mentasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i>	28%	28%	35%	42%	49%	56%
			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunaka n sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	2%	33%	40%	55%	77%	100%

Tabel 7 - Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

2.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif Tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Siak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Berdasarkan e- Government	Sasaran 1 :	Strategi 1.1 :	Kebijakan 1.1.1 : Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pelayanan dan akses informasi, komunikasi dan informatika Kebijakan 1.1.2 : Optimalisasi pemanfaatan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N) Kebijakan 1.1.3 : Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik Kebijakan 1.1.4 : Peningkatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak, Online dan Elektronik
		Strategi 1.2 :	Kebijakan 1.2.1 :
	Sasaran 2 :	Strategi 2.1 :	Kebijakan 2.1.1 :
	Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Government menuju Kabupaten Siak sebagai	Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika	Menyusun Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah



	Smart City		Kabupaten Siak Kebijakan 2.1.2 : Meningkatkan pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Smart City Kebijakan 2.1.3 : Meningkatkan penggunaan aplikasi umum dan khusus untuk pelayanan publik dan KePemerintahan Kebijakan 2.1.4 : Peningkatan Integrasi Layanan Publik dan KePemerintahan Kebijakan 2.1.5 : Peningkatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City
		Strategi 2.2 : Meningkatkan layanan akses jaringan internet di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Kebijakan 2.2.1 : Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda secara terpusat di Diskominfo Kabupaten Siak
		Strategi 2.3 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kebijakan 2.3.1 : Peningkatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi

Tabel 8 - Strategi dan Arah Kebijakan

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 192/HK/KPTS/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak 2021-2026 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis.

Adapun IKU Diskominfo Kabupaten Siak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Diskominfo Kabupaten Siak Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Berbasis e-Government	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	82	82	84	86	88	90
			Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	-	11%	46%	81%	93%	100%
		Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Government menuju Kabupaten Siak sebagai <i>Smart City</i>	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	2,0	2,5	2,9	3,02	3,4
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i>	28%	28%	35%	42%	49%	56%

			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	2%	33%	40%	55%	77%	100%
--	--	--	--	----	-----	-----	-----	-----	------

Tabel 9 - Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tahun 2024 termuat di dalam Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, berikut rencana kinerja Diskominfo Kabupaten Siak tahun 2024:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Diskominfo Kabupaten Siak
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2024
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Berbasis e-Government	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	86
			Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	81%
		Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Government menuju Kabupaten Siak sebagai <i>Smart City</i>	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,9
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i>	42%
			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	55%

Tabel 10 - Rencana Kinerja Diskominfo Kabupaten Siak

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Siak
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	Angka	86
		Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	Persen	81%
2	Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Government menuju Kabupaten Siak sebagai <i>Smart City</i>	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,9

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i>	Persen	42%
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	Persen	55%

Tabel 11 - Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Siak

2.6 Dukungan Anggaran

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024 tersebut, Diskominfo Kabupaten Siak mendapat dukungan anggaran APBD-P sebesar Rp. 43.652.819.872,00,- (Empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 5 program dengan 11 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Siak
Tahun Anggaran 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				
ADMISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	11.121.180.372,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi			3.747.887.599,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	3.747.887.599,00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.850.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15.850.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum perangkat daerah yang dipenuhi			2.035.773.300,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	54.658.300,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	312.628.600,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	143.034.400,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	25.460.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1	1.499.992.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				819.243.423,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	1	244.912.423,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	10	574.331.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi			3.679.035.400,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	24.428.800,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	146.550.000,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	3.508.056.600,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			823.390.650,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	651.548.150,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	171.842.500,00
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik			17.058.371.500,00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya akses komunikasi dan informasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			17.058.371.500,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1.301.003.700,00
Layanan Hubungan Media	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas	Layanan	4	8.399.962.800,00
Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit	1	7.357.405.000,00
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi			13.378.797.000,00
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan	Terpenuhinya nama domain dan jaringan intra Pemerintah daerah			7.929.363.000,00

Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit		7.929.363.000,00
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			5.449.434.000,00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	30	3.072.620.000,00
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	2	378.800.000,00
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	10	260.670.000,00
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan system penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	43.900.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	5	1.693.444.000,00
URUSAN STATISTIK				
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota			1.854,280.500,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota			1.854,280.500,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	6	1.854,280.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamana n informasi			240.190.500,00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi			240.190.500,00
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Berbasis Eletronik dan Non Eletronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	240.190.500,00

Tabel 12 - Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Siak

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang melaksanakan urusan Pemerintah dibidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, dalam melaksanakan urusan tersebut Diskominfo Kabupaen Siak wajib melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Hal tersebut merupakan tindaklanjut atas pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangak Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

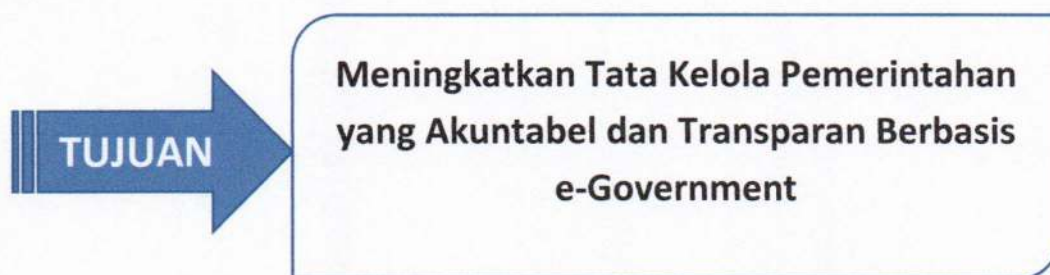
No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	55% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017
Tabel 13 - Skala Nilai Peringkat Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Analisis dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak sebagai Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa sub pelaksana baik setingkat bidang maupun seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sub pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

untuk melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian pelaksanaan Renstra Diskominfo Kabupaten Siak Periode Renstra 2021-2026, dapat dilihat pada uraian berikut :



Guna mewujudkan Misi ke-1 (satu) RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Melalui Penerapan E-government”. Diskominfo Kabupaten Siak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian menetapkan tujuan yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Berbasis e-Government”. Melalui tujuan tersebut diharapkan tersedianya tata kelola Pemerintahan terkait layanan administrasi Pemerintahan dan layanan publik yang akuntabel, transparan

dengan berbasis elektronik agar pelayanan yang diberikan lebih efisien dan efektif.

1) Capaian Kinerja Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Diskominfo Kabupaten Siak telah menetapkan 2 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian kinerja tahun anggaran 2024 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi yang telah diperjanjikan kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	Angka	86	88	102,33%	Sangat tinggi
		Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	Persen	81%	97,67%	120,58%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Government menuju Kabupaten Siak sebagai <i>Smart City</i>	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,9	3,54	122,07%	Sangat Tinggi
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i>	Persen	42%	74,41%	177,17%	Sangat Tinggi
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	Persen	55%	67%	121,82%	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian						128,79%	Sangat Tinggi

Tabel 14 - Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dirincikan capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan capaian rata-rata sebesar 111,45% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Adapun capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik, dengan capaian sebesar 102,33% (sangat tinggi) dari target sebesar 86 dan realisasi sebesar 88 diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Komisi Informasi Publik (KIP). Tingginya capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Tersedianya sarana dan prasarana PPID di MPP Kabupaten Siak, yang mana ditahun sebelumnya sarana dan prasarana PPID masih belum memadai/tidak sesuai standar.
- Adanya kegiatan sosialisasi penyelenggaraan PPID di Pemerintah Kabupaten Siak.
- Data informasi publik pada Portal PPID belum seluruhnya diinput oleh OPD.

2. Indikator Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal, adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 sebesar 44% dan pada tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 97,67% dari yang ditargetkan sebesar 81%. Adapun tingginya capaian ini karena beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

- Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dan fasilitasi kegiatan rapat-rapat oleh Ketua Forum Data (Bapperida Kabupaten Siak)
- Adanya dukungan dari BPS Kabupaten Siak dalam hal pendampingan kegiatan statistik sektoral
- Publikasi data statistik sektoral di portal Istana Data

b. Sasaran Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Government menuju Kabupaten Siak sebagai *Smart City*, dengan

capaian rata-rata sebesar 140,35% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Adapun capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan capaian sebesar 122,07% (sangat tinggi) dari target sebesar 2,9 dan realisasi sebesar 3,54 yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari Kemenpan RB dengan mendapatkan nilai maksimal pada Domain Kebijakan SPBE dan Layanan SPBE. Adapun faktor tercapainya target tersebut yakni sebagai berikut:
 - Adanya kebijakan internal yang kuat, seperti Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2023 dan dokumen Peta Rencana SPBE.
 - Kematangan kebijakan dalam berbagai aspek, termasuk manajemen data, layanan pusat data, jaringan intra, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
 - Penggunaan aplikasi nasional yang sudah terjamin kehandalannya dalam layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.
 - Keberadaan forum koordinasi SPBE dan tim pengelola yang telah ditetapkan melalui SK Bupati dan Diskominfo.
2. Indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung *smart city*, dengan capaian sebesar 177,17% (sangat tinggi) dari target sebesar 42% dan realisasi sebesar 74,41%, terdapat 32 perangkat daerah dari 43 perangkat daerah yang telah mengimplementasikan inovasi yang mendukung *smart city*;
3. Indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah, dengan capaian sebesar 121,82% (sangat tinggi) dari target sebesar 55% dan realisasi sebesar 67%, realisasi tersebut diperoleh berdasarkan sebanyak 29 perangkat daerah yang telah menggunakan sandi

(akun e-mail sanapati) dalam komunikasi perangkat daerah dari 43 perangkat daerah. Sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar 14 perangkat daerah.

Sedangkan untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan kewajiban dari setiap Perangkat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan Pemerintahan yang telah dilaksanakan, berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Diskominfo Kabupaten Siak dari Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, nilai akuntabilitas kinerja Diskominfo Kabupaten Siak Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2022 sebesar 71,83 BB (sangat baik) dan pada tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 80,25 dengan kategori nilai A (memuaskan).

2) Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024

Perbandingan capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Siak tahun ini dengan tahun lalu pada periode Renstra Diskominfo Kabupaten Siak Tahun 2021-2026, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tingkat Improvement Realisasi
				Target Kinerja	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi	
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	Angka	84	40,70	86	88	116,22%
		Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	Persen	46	44	81	97,67	122%
2	Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Government menuju Kabupaten Siak sebagai <i>Smart City</i>	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,5	3,01	2,9	3,54	17,6%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i>	Persen	35	41,86	42	74,41	77,76%

		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	Persen	40	67	55	67	0%
--	--	--	--------	----	----	----	----	----

Tabel 15 - Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan terhadap capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu terdapat 2 (dua) capaian indikator kinerja sasaran yang mengalami peningkatan, yakni indicator Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik mengalami peningkatan improvement realisasi sebesar 116,22% dan indicator jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal memiliki tingkat improvement realisasi sebesar 122%, sehingga secara keseluruhan indicator kinerja sasaran telah mencapai target yang telah ditentukan.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Pengukuran realisasi kinerja dengan mengacu pada Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dijabarkan pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja/Sasaran							Target Kinerja/Sasaran							Target Kinerja/Sasaran						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	Nilai	82	82	84	86	88	90		87	74,3	40,7	88				106%	91%	48,45%	102%	0%	0%	
		Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	Persen	n/a	11%	46%	81%	93%	100%		n/a	n/a	44%	98%				n/a	n/a	96,06%	121%	0%	0%	
2	Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E- Government menuju Kabupaten Siak sebagai Smart City	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	1,9	2	2,5	2,9	3,02	3,4		1,9	2,34	3,01	3,54				100%	117%	120,40%	122%	0%	0%	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City	Persen	28%	28%	35%	42%	49%	56%		28%	49%	42%	74%				100%	175%	119,60%	177%	0%	0%	
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	Persen	2%	33%	40%	55%	77%	100%		2%	67%	67%	67%				100%	203%	167,50%	122%	0%	0%	

Tabel 16 - Pencapaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026



Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja yang mengacu pada target jangka menengah Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA (%)
				2024	2024	
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	Nilai	86	88	102,33%
		Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	Persen	81	97,67	120,58%
2	Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Government menuju Kabupaten Siak sebagai <i>Smart City</i>	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,9	3,54	122,07%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i>	Persen	42	74,41	177,17%
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	Persen	55	67	121,82%

Tabel 17 - Pencapaian Kinerja yang mengacu pada target jangka menengah Renstra

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara target jangka menengah Renstra yakni tahun 2024 dan Capaian Renstra tahun ini, 5 indikator Diskominfo Kabupaten Siak telah mencapai target jangka menengah Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Siak yang termasuk dalam standar nasional adalah indikator kinerja Nilai Indeks SPBE, yang mana realisasi dan capaiannya dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

indikator Kinerja	Tahun 2024				Ket.
	Nasional		Pemda Kabupaten Siak		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,85	3,12	2,9	3,54	Jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE Nasional, capaian indeks SPBE Pemda Kabupaten Siak lebih tinggi sebesar 0,42.

Tabel 18 - Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

5) Capaian Kinerja sesuai Bidang Urusan Perangkat Daerah

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Pengelolaan Opini Publik dan Komunikasi Publik

Capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Siak terkait dengan layanan opini publik dan komunikasi publik sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Pengelolaan Opini Publik dan Komunikasi Publik Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
A	Opini Publik (SP4N Lapor)	
1	Laporan Aduan Publik	
1	Android	10
2	Email Instansi	0
3	SMS	0
4	Tatap Muka	0
5	Telepon	0
6	Website	28
7	Whatsapp	-
8.	Call Center	21
9.	Facebook	16
10	Instagram	3
11.	Whatsapp	3
	Total	81
II	Laporan yang Sudah Ditanggapi	
1	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	4
2	Bantuan Sosial	1
3	Lainnya Terkait Sosial dan Kesejahteraan	4
4	Anggaran & Perbendaharaan	0
5	Anggaran dan Perbendaharaan	0
6	Kartu Keluarga	1
7	Lainnya Terkait SDA (air minum)	1
8	Penerangan Jalan	2
9	Lainnya Terkait Pendidikan Dasar dan Menengah	3
10	Pendidikan Tinggi	0
11	Bantuan Sosial (Kartu Indonesia Sehat)	0
12	Program Keluarga Harapan	0
13	Kebijakan ASN	0
	Total	15
B	Komunikasi Publik	
1	Jumlah berita	1.039 Berita
2	Jumlah berita nasional hoax	306 Berita

3	Jumlah Informasi yang di Publikasikan melalui media Elektronik (Siak TV)	1.200 Informasi
4	Jumlah Informasi yang di Publikasikan melalui media Elektronik (Radio Pemerintah Kabupaten Siak)	5.110 Informasi

Tabel 19 - Capaian Kinerja Pengelolaan Opini Publik dan Komunikasi Publik Tahun 2024

Berdasarkan laporan tahunan pengelolaan aspirasi/pengaduan Masyarakat di Kabupaten Siak melalui SP4N - LAPOR! yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Pengelolaan Opini Publik dan Komunikasi Publik Tahun 2024

Status	Jumlah laporan	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Belum Diverifikasi	0	0
Belum Ditindaklanjuti	0	0
Sedang Diproses	0	0
Tunda	4	1
Arsip	0	0
Selesai	17	71
Total Laporan	21	72

Sumber data : <https://lapor.go.id/>

Tabel 20 - Capaian Kinerja Pengelolaan Opini Publik dan Komunikasi Publik Tahun 2024

2. Pengelolaan Informasi Publik dan Stastistik

Capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Siak terkait dengan layanan Informasi publik dan statistik sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian kinerja pengelolaan Informasi Publik dan Stastistik Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
A	Informasi Publik (PPID)	
1	Jumlah Pengaduan yang diterima	6 Pemohon
2	Jumlah Pengaduan yang telah ditindaklanjuti	6 Pengaduan

B	Statistik
1	Buku Siak Dalam Angka
2	Buku Kecamatan Dalam Angka
3	Buku Analisis Rasio Indeks Gini
4	Buku Indeks Harga Konsumen (IHK)
5	Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan
6	Buku Indeks Kerukunan Beragama

Tabel 21 - Capaian kinerja pengelolaan Informasi Publik dan Statistik

3. Pengelolaan Kehumasan

Capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Siak terkait dengan pengelolaan kehumasan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian kinerja pengelolaan kehumasan
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Informasi yang dipublikasikan
A	Media Cetak	
1	Advetorial	30 Informasi
2	Infotorial	820 Informasi
3	Galeri	-
4	Iklan	19 Informasi
B	Media Siber/ Online	
1	Advetorial	-
2	Infotorial	3853 Informasi
3	Banner	171 Informasi
4	Iklan	-
C	Media Elektronik	
1	Iklan/advertorial pada Radio	465 Informasi
2	Berita/Advetorial pada televisi	6 Informasi
D	Media Luar Ruangan	
1	Baliho	30 Set

Tabel 22 - Capaian kinerja pengelolaan kehumasan

4. Pengelolaan e-Government

Capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Siak terkait dengan pengelolaan e-Government sebagai berikut:

- Call center 112

Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 bertujuan untuk mempermudah Masyarakat mengingat nomor darurat, mempercepat penanggulangan keadaan darurat, serta mempermudah koordinasi antar instansi terkait.

Dibangunnya Pusat Panggilan Darurat (*Call Center* 112) merupakan salah satu upaya Pemerintah daerah dalam mempercepat pertolongan kepada Masyarakat yang mengalami kondisi gawat darurat, seperti kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan/atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.

- CCTV Kota terintegrasi

Sebanyak 52 Kamera CCTV Kota Terintegrasi telah di bangun di wilayah strategis Kabupaten Siak, hal ini bertujuan sebagai upaya pencegahan terhadap aksi kriminal dan kejahatan. CCTV mampu merekam sekaligus menampilkan video secara live sehingga petugas operator CCTV Kota Terintegrasi dapat memantau kondisi suatu tempat secara langsung. Adapun Lokasi CCTV yang terpasang di beberapa titik strategis sebagai berikut:

1. Simp mess pemda : 3 unit
2. Simp kwalian : 3 unit
3. Bund SPBU : 3 unit
4. Simp 3 SD sutomo : 3 unit
5. Simp 4 sutomo : 4 unit

- 
6. RSUD lama : 3 unit
 7. Depan gereja : 2 unit
 8. Simp taman sri bijuangsa : 2unit
 9. Simp Kantor camat : 4unit
 10. Depan ochicken : 3unit
 11. Simp sma 1 : 2unit
 12. Bund gambus : 2unit
 13. Istana peraduan : 1unit
 14. Taman Tengku agung : 1 unit
 15. Bund diskominfo : 1unit
 16. Pasar belantik : 1unit
 17. Siak bermadah : 1unit
 18. Jembatan tasl : 2 unit
 19. Taman rusa : 1unit
 20. Simp 4 bungaraya : 1unit
 21. Simp 4 rapp : 1unit
 22. Simp Siak : 1unit
 23. Pos dishub : 1unit
 24. Simp 4 pewartang : 1unit
 25. Simp 3 Minas : 1unit
 26. Simp 4 tk muzaffasyah : 4 unit
- Jumlah dokumen dan kebijakan terkait pengembangan SPBE / e-Government yang telah disusun
1. Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penerapan Masterlan Smart City Kabupaten Siak;
 2. Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak
 3. Peraturan Bupati Siak Nomor 185 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Di Kabupaten Siak

4. Peraturan Bupati Siak Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Siak
 5. Peraturan Bupati Siak Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 6. Sk Kebijakan Internal SPBE
 7. Sk Tim Audit TIK
 8. Sk Tim Auditee TIK
 9. Sk Koordintor (Sk Bupati)
 10. Sop Aplikasi
 11. Sop Domain dan Hosting
 12. Sop Jaringan
 13. Sop Keamanan
5. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Sebagai upaya dalam mewujudkan misi ke-1 (satu) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Melalui Penerapan E-*government*”, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah melaksanakan layanan publik/administrasi Pemerintahan dengan memanfaatkan penggunaan sistem digital (elektronik) baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Adapun layanan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang ada s.d 2024

No	URL	Kategori Layanan	Jenis Aplikasi
1	bapperida.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
2	bkd.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
3	bkpsdmd.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus

No	URL	Kategori	Jenis Aplikasi
4	bpbd.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
5	desa-wisata-dayun.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
6	dinkes.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
7	dinsos.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
8	disdagperin.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
9	disdikbud.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
10	disdukcapil.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
11	dishub.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
12	diskannak.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
13	diskominfo.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
14	dispar.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
15	dispورا.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
16	distransnaker.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
17	dlh.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
18	dpmk.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
19	dprd.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
20	inspektorat.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
21	kampung-benhul.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus

No	URL	Kategori	Jenis Aplikasi
22	kampung-dosan.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
23	kampung-jatibaru.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
24	kampung-srigemilang.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
25	kec-bungaraya.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
26	kec-kandis.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
27	kec-kerincikanan.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
28	kec-kotogasib.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
29	kec-lubukdalam.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
30	kec-mempura.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
31	kec-minas.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
32	kec-pusako.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
33	kec-siak.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
34	kec-sungaiapit.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
35	kec-tualang.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
36	mediacenter.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
37	perekonomian.setda.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
38	pesonasiak.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
39	pkk-kec-dayun.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus

No	URL	Kategori	Jenis Aplikasi
40	puskesmas-blutu.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
41	puskesmas-bungaraya.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
42	puskesmas-dayun.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
43	puskesmas-kandis.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
44	puskesmas-kerincikanan.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
45	puskesmas-kotogasib.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
46	puskesmas-lubukdalam.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
47	puskesmas-mempura.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
48	puskesmas-mengkanan.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
49	puskesmas-minas.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
50	puskesmas-perawang.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
51	puskesmas-pusako.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
52	puskesmas-sabakauh.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
53	puskesmas-siak.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
54	puskesmas-sungaiapit.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
55	puskesmas-sungaimandau.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
56	puskesmas-tualang.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
57	putarukim.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus

No	URL	Kategori	Jenis Aplikasi
58	rsud-kerincikanan.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
59	rsud-minas.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
60	rsud-perawang.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
61	rsud.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
62	satpolpp.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
63	satukato.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
64	uptd-farmasi.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
65	uptd-labkesda.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
66	web.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
67	bagianhukum.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
68	dispusip.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
69	e-pusda.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
70	e-sakip.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
71	jdih.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
72	pesonasiak.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
73	ppid.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
74	satukato.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
75	siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus

No	URL	Kategori	Jenis Aplikasi
76	sikompang.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
77	silau.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
78	teras.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
79	pesonasiak.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
80	corona.siakkab.go.id	Layanan Publik	Aplikasi Khusus
81	bag-pertanahan.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
82	e-office.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
83	simtower.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
84	sosial.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
85	counter.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
86	e-dash.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
87	e-umkm.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
88	egov.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
89	eplanning.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
90	helpdesk.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
91	kait.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
92	siakkito.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
93	sidagu.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus

No	URL	Kategori	Jenis Aplikasi
94	sila.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
95	simdumas.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
96	simptlhp.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
97	sinergitas.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
98	sipasti.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
99	smartkampung.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
100	tte.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
101	vc.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
102	simak.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
103	sicomel.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
104	e-media.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Khusus
105	srikandi.arsip.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Umum
106	siakkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Umum
107	SIAK Disdukcapil	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Umum
108	lapor.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Umum
109	smartbangkom.lan.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Umum
110	lpse.siakkab.go.id	Administrasi Pemerintahan	Aplikasi Umum

Tabel 23 - Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang ada s.d 2024

6. Pengelolaan Domain dan Sub Domain

Domain dan Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika *Kabupaten Siak* adalah sebanyak 105 (seratus lima) domain dan sub domain yang terdiri dari 2 (dua) domain dan 103 (seratus tiga) sub domain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Domain dan Sub Domain

No	Domain	Kategori
1	pesonasiak.id	Domain
2	siakkab.go.id	Domain
3	admin.siakkab.go.id	Subdomain
4	ajak.siakkab.go.id	Subdomain
5	alamat.siakkab.go.id	Subdomain
6	bagianhukum.siakkab.go.id	Subdomain
7	bag-pertanahan.siakkab.go.id	Subdomain
8	bappeda.siakkab.go.id	Subdomain
9	berakhlak.siakkab.go.id	Subdomain
10	bkd.siakkab.go.id	Subdomain
11	bkpsdmd.siakkab.go.id	Subdomain
12	bpbd.siakkab.go.id	Subdomain
13	corona.siakkab.go.id	Subdomain
14	counter.siakkab.go.id	Subdomain
15	cron.corona.siakkab.go.id	Subdomain
16	cron.siakkab.go.id	Subdomain
17	dashboard.siakkab.go.id	Subdomain
18	desa-wisata-dayun.siakkab.go.id	Subdomain
19	dinkes.siakkab.go.id	Subdomain
20	dinsos.siakkab.go.id	Subdomain
21	disdagperin.siakkab.go.id	Subdomain
22	disdikbud.siakkab.go.id	Subdomain
23	disdukcapil.siakkab.go.id	Subdomain
24	dishub.siakkab.go.id	Subdomain

No	Domain	Kategori
25	diskannak.siakkab.go.id	Subdomain
26	diskominfo.siakkab.go.id	Subdomain
27	diskopumkm.siakkab.go.id	Subdomain
28	dispar.siakkab.go.id	Subdomain
29	dispورا.siakkab.go.id	Subdomain
30	dispusip.siakkab.go.id	Subdomain
31	distan.siakkab.go.id	Subdomain
32	distransnaker.siakkab.go.id	Subdomain
33	dkp.siakkab.go.id	Subdomain
34	dlh.siakkab.go.id	Subdomain
35	dpmk.siakkab.go.id	Subdomain
36	dpppappkb.siakkab.go.id	Subdomain
37	dprd.siakkab.go.id	Subdomain
38	e-arsip.siakkab.go.id	Subdomain
39	e-dash.siakkab.go.id	Subdomain
40	egov.siakkab.go.id	Subdomain
41	egov2.siakkab.go.id	Subdomain
42	eksekutif-board.siakkab.go.id	Subdomain
43	eplanning.siakkab.go.id	Subdomain
44	e-pusda.siakkab.go.id	Subdomain
45	e-sakip.siakkab.go.id	Subdomain
46	e-umkm.siakkab.go.id	Subdomain
47	festivalfilmpendek.siakkab.go.id	Subdomain
48	helpdesk.siakkab.go.id	Subdomain
49	inspektorat.siakkab.go.id	Subdomain
50	istanadata.siakkab.go.id	Subdomain
51	jdih.siakkab.go.id	Subdomain
52	jdih-dprd.siakkab.go.id	Subdomain
53	kec-bungaraya.siakkab.go.id	Subdomain
54	kec-dayun.siakkab.go.id	Subdomain
55	kec-kandis.siakkab.go.id	Subdomain
56	kec-kerincikanan.siakkab.go.id	Subdomain
57	kec-kotogasib.siakkab.go.id	Subdomain
58	kec-lubukdalam.siakkab.go.id	Subdomain

No	Domain	Kategori
59	kec-mempura.siakkab.go.id	Subdomain
60	kec-minas.siakkab.go.id	Subdomain
61	kec-pusako.siakkab.go.id	Subdomain
62	kec-siak.siakkab.go.id	Subdomain
63	kec-sungaiapit.siakkab.go.id	Subdomain
64	kec-tualang.siakkab.go.id	Subdomain
65	mail.siakkab.go.id	Subdomain
66	malasidikmas.siakkab.go.id	Subdomain
67	mediacenter.siakkab.go.id	Subdomain
68	pesonasiak.id	Subdomain
69	pkk-kec-dayun.siakkab.go.id	Subdomain
70	ppid.siakkab.go.id	Subdomain
71	puskesmas-blutu.siakkab.go.id	Subdomain
72	puskesmas-bungaraya.siakkab.go.id	Subdomain
73	puskesmas-dayun.siakkab.go.id	Subdomain
74	puskesmas-kandis.siakkab.go.id	Subdomain
75	puskesmas-kerincinaan.siakkab.go.id	Subdomain
76	puskesmas-kotogasib.siakkab.go.id	Subdomain
77	puskesmas-lubukdalam.siakkab.go.id	Subdomain
78	puskesmas-mempura.siakkab.go.id	Subdomain
79	puskesmas-mengkapain.siakkab.go.id	Subdomain
80	puskesmas-minas.siakkab.go.id	Subdomain
81	puskesmas-perawang.siakkab.go.id	Subdomain
82	puskesmas-pusako.siakkab.go.id	Subdomain
83	puskesmas-sabakauh.siakkab.go.id	Subdomain
84	puskesmas-siak.siakkab.go.id	Subdomain
85	puskesmas-sungaiapit.siakkab.go.id	Subdomain
86	puskesmas-sungaimandau.siakkab.go.id	Subdomain
87	puskesmas-tualang.siakkab.go.id	Subdomain
88	putarukim.siakkab.go.id	Subdomain
89	rsud.siakkab.go.id	Subdomain
90	rsud-kerincinaan.siakkab.go.id	Subdomain
91	rsud-minas.siakkab.go.id	Subdomain
92	rsud-perawang.siakkab.go.id	Subdomain

No	Domain	Kategori
93	satpolpp.siakkab.go.id	Subdomain
94	satukato.siakkab.go.id	Subdomain
95	scp.siakkab.go.id	Subdomain
96	siakcomel.siakkab.go.id	Subdomain
97	siakkab.go.id	Subdomain
98	sidagu.siakkab.go.id	Subdomain
99	sidak.siakkab.go.id	Subdomain
100	sigaya.siakkab.go.id	Subdomain
101	sikompang.siakkab.go.id	Subdomain
102	sila.siakkab.go.id	Subdomain
103	silau.siakkab.go.id	Subdomain
104	silepat.siakkab.go.id	Subdomain
105	simdumas.siakkab.go.id	Subdomain
106	simonah.siakkab.go.id	Subdomain
107	simptlhp.siakkab.go.id	Subdomain
108	simtower.siakkab.go.id	Subdomain
109	sinergitas.siakkab.go.id	Subdomain
110	sintaikm.siakkab.go.id	Subdomain
111	siormas.siakkab.go.id	Subdomain
112	sipasti.siakkab.go.id	Subdomain
113	sippuan.siakkab.go.id	Subdomain
114	smartkampung.siakkab.go.id	Subdomain
115	stunting.siakkab.go.id	Subdomain
116	teras.siakkab.go.id	Subdomain
117	uptd-farmasi.siakkab.go.id	Subdomain
118	uptd-labkesda.siakkab.go.id	Subdomain
119	vc.siakkab.go.id	Subdomain
120	wbs.siakkab.go.id	Subdomain
121	web.siakkab.go.id	Subdomain
122	rsud-tualang.siakkab.go.id	Subdomain
123	ukpbj.siakkab.go.id	Subdomain
124	dpmptsp2.siakkab.go.id	Subdomain
125	kodim0322.siakkab.go.id	Subdomain
126	sijabri.siakkab.go.id	Subdomain

No	Domain	Kategori
127	admin.siakkab.go.id	Subdomain
128	ajak.siakkab.go.id	Subdomain
129	alamat.siakkab.go.id	Subdomain
130	bagianhukum.siakkab.go.id	Subdomain
131	bag-pertanahan.siakkab.go.id	Subdomain
132	bappeda.siakkab.go.id	Subdomain
133	berakhlak.siakkab.go.id	Subdomain
134	bkd.siakkab.go.id	Subdomain
135	bkpsdmd.siakkab.go.id	Subdomain
136	bpbd.siakkab.go.id	Subdomain
137	corona.siakkab.go.id	Subdomain
138	counter.siakkab.go.id	Subdomain

Tabel 24 - Domain dan Sub Domain

7. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Persandian

Capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Siak terkait dengan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Persandian sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

a. Penyediaan Jaringan Internet Pemerintah terpusat:

Jaringan Intra Pemerintah telah terpusat di Diskominfo Kabupaten Siak sebanyak 105 site, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 UPTD DISDUKCAPIL SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK
- 2 UPTD DISDUKCAPIL SABAK AUH KABUPATEN SIAK
- 3 UPTD DISDUKCAPIL PUSAKO KABUPATEN SIAK
- 4 UPTD DISDUKCAPIL BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK
- 5 SIAK TV KABUPATEN SIAK
- 6 SATPOL PP KABUPATEN SIAK
- 7 POSKO DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
- 8 PERPUSTAKAAN KUTAB KABUPATEN SIAK
- 9 KANTOR CAMAT SIAK KABUPATEN SIAK

- 
- 10 KANTOR CAMAT TUALANG KABUPATEN SIAK
 - 11 KANTOR BPBD KABUPATEN SIAK
 - 12 DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SIAK
 - 13 KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
 - 14 DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK
 - 15 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK
 - 16 PERPUSTAKAAN GEDUNG BARU KABUPATEN SIAK
 - 17 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIAK
 - 18 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIAK
 - 19 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK
 - 20 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK
 - 21 DINAS SOSIAL KABUPATEN SIAK
 - 22 DP3AP2KB KABUPATEN SIAK
 - 23 ISTANA SIAK KABUPATEN SIAK
 - 24 KANTOR CAMAT BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK
 - 25 KANTOR CAMAT SABAK AUH KABUPATEN SIAK
 - 26 KANTOR CAMAT SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK
 - 27 KANTOR CAMAT PUSAKO KABUPATEN SIAK
 - 28 KELURAHAN KAMPUNG DALAM KABUPATEN SIAK
 - 29 KELURAHAN KANDIS KABUPATEN SIAK
 - 30 KELURAHAN MINAS JAYA KABUPATEN SIAK
 - 31 KELURAHAN PERAWANG KABUPATEN SIAK
 - 32 KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KABUPATEN SIAK
 - 33 KELURAHAN SIMPANG BELUTU KABUPATEN SIAK

- 
- 
- 34 KELURAHAN TELAGA SAM-SAM KABUPATEN SIAK
 - 35 KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN SIAK
 - 36 DISHUB LLDASP KABUPATEN SIAK
 - 37 LPSE KABUPATEN SIAK
 - 38 MESS PEMDA KABUPATEN SIAK
 - 39 UPTD DISDUKCAPIL KANDIS KABUPATEN SIAK
 - 40 UPTD DISDUKCAPIL KOTO GASIP KABUPATEN SIAK
 - 41 UPTD DISDUKCAPIL MINAS KABUPATEN SIAK
 - 42 UPTD DISDUKCAPIL TUALANG KABUPATEN SIAK
 - 43 ABDI PRAJA 1 KABUPATEN SIAK
 - 44 ABDI PRAJA 3 KABUPATEN SIAK
 - 45 ABDI PRAJA 5 KABUPATEN SIAK
 - 46 ABDI PRAJA 6 KABUPATEN SIAK
 - 47 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAKA KABUPATEN
SIAK
 - 48 KANTOR CAMAT MINAS KABUPATEN SIAK
 - 49 KANTOR CAMAT MEMPURA KABUPATEN SIAK
 - 50 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK
 - 51 KANTOR CAMAT KANDIS KABUPATEN SIAK
 - 52 GEDUNG PERTEMUAN 1 KABUPATEN SIAK
 - 53 GEDUNG PERTEMUAN 2 KABUPATEN SIAK
 - 54 DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK
 - 55 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK
 - 56 UPTD DISDUKCAPIL SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK
 - 57 UPTD DISDUKCAPIL KAMPUNG DALAM KABUPATEN
SIAK
 - 58 UPTD DISDUKCAPIL KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK

- 
- 59 UPTD DISDUKCAPIL DAYUN KABUPATEN SIAK
 - 60 RSUD TUALANG KABUPATEN SIAK
 - 61 DISHUB KIR PERAWANG KABUPATEN SIAK
 - 62 KEDAI DPMPTSP KABUPATEN SIAK
 - 63 DPMPTSP KABUPATEN SIAK
 - 64 DPMK KABUPATEN SIAK
 - 65 KANTOR CAMAT SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK
 - 66 KANTOR CAMAT LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK
 - 67 KANTOR CAMAT KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK
 - 68 KANTOR CAMAT DAYUN KABUPATEN SIAK
 - 69 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
 - 70 BAGIAN PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
 - 71 BAGIAN EKONOMI KABUPATEN SIAK
 - 72 BAGIAN ADM PEMBANGUNAN KABUPATEN SIAK
 - 73 MESJID RAYA SYAHBUDDIN KABUPATEN SIAK
 - 74 KELURAHAN SUNGAI MEMPURA KABUPATEN SIAK
 - 75 KANTOR CAMAT KOTO GASIB KABUPATEN SIAK
 - 76 INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK
 - 77 DISHUB POS JEMBATAN SIAK
 - 78 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIAK
 - 79 BPKSDM KABUPATEN SIAK
 - 80 BAPPEDA KABUPATEN SIAK
 - 81 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SIAK
 - 82 KANTOR BUPATI KABUPATEN SIAK
 - 83 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK

- 
- 84 DPRD KABUPATEN SIAK
 - 85 ABDI PRAJA 2 KABUPATEN SIAK
 - 86 ABDI PRAJA 4 KABUPATEN SIAK
 - 87 BPBJ KABUPATEN SIAK
 - 88 SHELTER DINAS SOSIAL KABUPATEN SIAK
 - 89 DEPO ARSIP KABUPATEN SIAK
 - 90 SIAK ROOM KABUPATEN SIAK
 - 91 ORTAL KABUPATEN SIAK
 - 92 MPP KABUPATEN SIAK
 - 93 KELURAHAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK
 - 94 KANTOR DISDUKCAPIL KABUPATEN SIAK
 - 95 RSUD MINAS
 - 97 RSUD KANDIS
 - 98 DINAS PENDIDIKAN BALAI RUNG SRI
 - 99 UPTD LABKESDA SIAK
 - 100 PUSKESMAS SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK
 - 101 PUSKESMAS SIAK KABUPATEN SIAK
 - 102 PUSKESMAS KANDIS KABUPATEN SIAK
 - 103 PUSKESMAS PERAWANG KABUPATEN SIAK
 - 104 PUSKESMAS TUALANG KABUPATEN SIAK
 - 105 RSUD TENGKU RAFI'AN SIAK

b. Hotspot/Free Wifi :

Sebanyak 87 titik lokasi strategis telah dibangun layanan free wifi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses informasi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi,



meningkatkan kualitas layanan publik, inklusi digital, mendukung kegiatan pendidikan.

- 1 TAMAN SRI BIJUANGSA
- 2 TAMAN SINGAPUR 1
- 3 TAMAN SINGAPUR 2
- 4 TEPIAN SUNGAI JANTAN
- 5 GEDUNG MAHARATU
- 6 PANGGUNG SIAK BERMADAH
- 7 LOKET ISTANA SIAK
- 8 POS GERBANG ISTANA SIAK
- 9 TAMAN DEPAN ISTANA
- 10 BPBD KLASER 1 SIAK
- 11 BPBD KLASER 6 MEMPURA
- 12 TAMAN GASING
- 13 KANTOR UPTD SPAM KAMPUNG REMPAK
- 14 WIFI JL. SUTOMO 2
- 15 WIFI JL. SUTOMO 3
- 16 WIFI JL. SUTOMO 4
- 17 UPTD LABKESDA SIAK
- 18 DEKRANASDA KAB. SIAK
- 19 RUMAH BACA
- 20 GEDUNG LAM
- 21 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 7)
- 22 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 8)
- 23 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 9)
- 24 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 10)

- 25 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 11)
- 26 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 12)
- 27 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 13)
- 28 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 14)
- 29 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 15)
- 30 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 16)
- 31 WIFI JL. SULTAN ISMAIL (TURAP 17)
- 32 WIFI COFFE SHOP
- 33 WIFI BAWAH JEMBATAN SIAK LAWU (2)
- 34 WIFI BAWAH JEMBATAN SIAK LAWU (3)
- 35 WIFI BAWAH JEMBATAN SIAK LAWU (4)
- 36 WIFI BAWAH JEMBATAN SIAK LAWU (5)
- 37 TANGSI MILITER BELANDA
- 38 POLRES DAYUN
- 39 VIDEOTRON 1
- 40 AREA MASUK SKYWALK TENGGU BUANG
ASMARA
- 41 AREA KELUAR SKYWALK TENGGU BUANG
ASMARA
- 42 LAPAK BAZAR SKYWALK
- 43 BALAI LATIHAN KERJA PALUH
- 44 BPBD CLUSTER II SUNGAI APIT
- 45 UNIT SPAM IKK DAYUN
- 46 UNIT SPAM IKK LUBUK DALAM
- 47 LAPANGAN TENIS SAMPING LAM

- 
- 48 UNIT SPAM IKK SABAK AUH
 - 49 UNIT SPAM IKK BUNGARAYA
 - 50 WIFI MUZAFARSYAH (TAMAN LAMPU- LAMPU 3)
 - 51 WIFI MUZAFARSYAH (TAMAN LAMPU- LAMPU 4)
 - 52 WIFI MUZAFARSYAH (TAMAN LAMPU- LAMPU 5)
 - 53 WIFI MUZAFARSYAH (TAMAN LAMPU- LAMPU 6)
 - 54 WIFI MUZAFARSYAH (TAMAN LAMPU- LAMPU 7)
 - 55 WIFI MUZAFARSYAH (TAMAN LAMPU- LAMPU 7)
 - 56 WIFI HELIPET DEPAN DPRD
 - 57 TAMAN SUNGAI APIT
 - 58 RUMAH CAMAT SUNGAI APIT
 - 59 WIFI DEPAN RSUD TENGKU RAFIAN
 - 60 GEDUNG PRAMUKA
 - 61 UPTD JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN
 - 62 GEDUNG LAM 2
 - 63 UPTD ALKAL
 - 64 GUDANG BANSOS
 - 65 FARMASI
 - 66 ISLAMIC CENTER 1
 - 67 ISLAMIC CENTER 2
 - 68 GEDUNG KESENIAN
 - 69 GEDUNG DAERAH
 - 70 SPAM IKK SUAK LANJUT
 - 71 MANGROVE SUNGAI APIT
 - 72 RUANGAN ATAS JEMBATAN TENGKU AGUNG

SULTANAH LATIFAH

- 73 AREA LIFT JEMBATAN TENGKU AGUNG SULTANAH LATIFAH
- 74 AREA TAMAN TENGKU AGUNG
- 75 SIMPANG EMPAT HARMONIS LAMA
- 76 MASJID AN-NUR
- 77 WIFI ISLAMIC CENTER (3)
- 78 VIDEOTRON 2
- 79 SIMPANG 3 AIR MANCUR MAHARATU
- 80 UPTD METROLOGI PEGAL
- 81 TAMAN SUNGAI APIT 2
- 82 SIMPANG 4 FERRI TELUK MASJID
- 83 SPAM IKK MEMPURA
- 84 AREA ISTANA
- 85 SPAM IKK SUNGAI APIT
- 86 WIFI BAWAH JEMBATAN SIAK LAWO (6)
- 87 WIFI ISLAMIC CENTER (4)

c. Persandian :

Dalam rangka pengamanan informasi milik Pemerintah daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak pada tahun 2023 telah melakukan Sosialisasi kepada OPD di Lingkup Pemda Kabupaten Siak terkait pemanfaatan e-Mail Sanapati sebagai salah satu media komunikasi antar perangkat daerah. e-Mail Sanapati merupakan salah satu jaringan komunikasi sandi yang dibangun oleh Lembaga Sandi Negara dan bersifat



jaringan tertutup *secure closed email*. E-Mail Sanapati memiliki beberapa kelebihan antara lain proteksi terhadap *fake mail*, *spam e-mail*, *phising link* dan e-mail *bombing*. Saat ini terdapat 29 OPD dari 43 OPD yang telah mengimplementasikan penggunaan e-Mail Sanapati tersebut.

6) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapaun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.13
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Faktor Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	86 81	88 97,67	102,33 % 120,58 %	Sangat Tinggi Sangat Tinggi	- Tersedianya sarana prasarana pendukung PPID sesuai standar - Adanya sosialisasi kegiatan PPID kepada OPD terkait - Beberapa OPD masih belum secara kekelurahan mengupload Data Informasi Publik ke aplikasi PPID - Adanya dukungan dari pimpinan daerah, ketua Forum Data, dan BPS Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan data statistik sektoral - Adanya regulasi yang mengatur Satu Data melalui Perbup Siak Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Siak - Tidak adanya Sumber Daya Manusia khususnya tenaga Statisi untuk menjadi Admin Pengumpulan, Pengelola dan mengumpulkan Data yang dikumpulkan. - Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar OPD	- Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan PPID agar keterbukaan informasi semakin optimal. - Mengusulkan untuk penambahan ASN dibidang Statisi. - Meningkatkan koordinasi antar OPD melalui kegiatan rapat-rapat forum satu data
2	Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Governmen t menuju	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.9	3.54	122.07 %	Sangat Tinggi	- Adanya kebijakan internal yang kuat, seperti Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2023 dan dokumen Peta Rencana SPBE. - Kematangan kebijakan dalam berbagai aspek, termasuk manajemen data, layanan pusat data, jaringan intra, dan pengelolaan aplikasi SPBE. - Penggunaan aplikasi nasional yang sudah	- Meningkatkan penerapan manajemen SPBE dengan menyusun regulasi dan SOP terkait manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, serta perubahan organisasi. - Memperkuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara



Kabupaten Siak sebagai Smart City					terjamin kehandalannya dalam layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.	(BSSN) atau lembaga lain yang relevan untuk meningkatkan kualitas audit keamanan SPBE.	
					- Rendahnya tingkat kematangan penerapan manajemen SPBE, termasuk manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen aset TIK, dan manajemen perubahan.	- Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM secara berkala agar lebih siap dalam mengelola dan mengimplementasikan SPBE secara optimal.	
					- Belum optimalnya pelaksanaan audit keamanan SPBE, karena belum adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif.		
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City	42	74,41	177,17 %	Sangat Tinggi	- Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah	- Sosialisasi konsep smart city
					- Kebijakan yang jelas	- pengembangan infrastruktur pendukung	
					- Beberapa OPD memiliki inovasi yang mendukung Smart City di Kabupaten Siak	- pelatihan bagi masyarakat	
					- Adanya kolaborasi antar unit kerja	- kerjasama dengan industri	
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	55	67	121,82 %	Sangat Tinggi	- Belum adanya ASN dengan jabatan fungsional sandiman untuk mendukung kegiatan persandian	- Melakukan sosialisasi kepada OPD yang belum mengimplementasikan Akun Sanapati sebagai sarana komunikasi antar perangkat daerah
					- Belum memadainya sarana dan prasarana terkait pengamanan informasi	- Melakukan money secara berkala untuk peningkatan penggunaan layanan komunikasi sandi	- Melakukan monev secara berkala untuk peningkatan penggunaan layanan komunikasi sandi
							- Mengusulkan untuk penambahan ASN dibidang <i>Security Sistem</i>
							- Peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan Diklat/bimtek berkaitan dengan TIK

Tabel 25 - Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

7) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Efisien = Capaian kinerja – Capaian Anggaran

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak.

Tabel 3.14
Analisis Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran (%)
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak								
1	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	86	88	102,33%	17.058.371.500	9.676.483.786	56,73%	45,60%
2	Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	81%	97,67%	120,58%	1.854.280.500	665.061.900	35,87%	84,71%
Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Government menuju Kabupaten Siak sebagai <i>Smart City</i>								
3	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,9	3,54	122,07%	11.685.353.000	5.134.194.068	89,40%	32,67%
4	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i>	42%	74,41%	177,17%	1.693.444.000	598.561.200	35,35%	141,82%
5	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	55%	67%	121,82%	240.190.500	0	0,00%	121,82%
Rata-Rata Capaian				128,79%			43,47%	

Tabel 26 - Analisis Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Diskominfo Kabupaten Siak dengan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Secara keseluruhan realisasi capaian indikator kinerja telah mencapai target kinerja bahkan

melebihi 100%, sementara untuk realisasi anggaran terlihat begitu rendah hal ini terjadi karena adanya defisit anggaran di tahun 2024 yang berdampak terhadap capaian realisasi anggaran yang sangat kecil, beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan pada tahun 2024 akan dilakukan pembayaran di anggaran tahun 2025 sesuai dengan hasil dari reviu oleh Inspektorat Daerah Siak.

8) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2024 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2024 dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen dan tanggungjawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing.

Tabel 3.15
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	102,33%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi public	100%	100%	100%	- Menyurati setiap OPD untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik - Melakukan sosialisasi mengenai PPID dan SP4N LAPOR! ke setiap OPD - Meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks. - Verifikasi dan Klarifikasi terkait isu hoaks
	Jumlah persentase data statistik sektoral yang tersedia pada Portal	120,58%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	70%	97,67%	140%	- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral - Mengusulkan untuk penambahan ASN dibidang Statisi. - Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Portal Satu Data Siak dan e-Walidata sebagai wadah penyimpanan, pengelolaan dan penyebarluasan data statistik sektoral Pemerintah Daerah kabupaten Siak
Meningkatnya Layanan Pemerintahan berbasis E-Government menuju	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	122,07%	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara	100%	100%	100%	- Reviu kebijakan SPBE - Membuat buku saku petunjuk penggunaan aplikasi (juklak dan Juknis) - Melakukan sosialisasi/FGD tentang SPBE - Menyusun dokumen terkait Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi,



Kabupaten Siak sebagai <i>Smart City</i>	Elektronik (SPBE)			Online dan Terintegrasi				Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE - Menindaklanjuti hasil audit TIK - Menyediakan jaringan internet sekolah dan free wifi - Input data arsitektur SPBE pada aplikasi SIA-SPBE - Melakukan reviu secara berkala terhadap kegiatan TIK
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>Smart City</i>	177,17 %	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	100%	100%	100%	- Mengusulkan untuk penambahan ASN dibidang TIK - Meningkatkan pengalokasian anggaran untuk program Smart City - Melakukan Sosialisasi/FGD terkait program smart city ke OPD di kabupaten Siak - Meningkatkan peran instansi BUMN/Swasta dalam mendukung program smart city - Melakukan Monev terkait pelaksanaan Smart City dilingkungan Pemda Kabupaten Siak Meningkatkan inovasi penyelenggaraan Pemerintahan agar lebih efisien dan efektif
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	121,82 %	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	58%	67%	116%	- Melakukan sosialisasi kepada OPD yang belum mengimplementasikan Akun Sanapati sebagai sarana komunikasi antar perangkat daerah - Melakukan monev secara berkala untuk peningkatan penggunaan layanan komunikasi sandi - Mengusulkan untuk penambahan ASN dibidang <i>Security Sistem</i> - Peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan Diklat/bimtek berkaitan dengan TIK

Tabel 27 - Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, seluruh program telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak yang mana ditahun sebelumnya masih terdapat 1 (satu) program yang belum mencapai target yang ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Diskominfo untuk mencapai kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis tentunya memerlukan dukungan Anggaran melalui Belanja Daerah yang memadai. Kemudian Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 126 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan



Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Siak, yang mana pada pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa wewenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai objek Retribusi dilimpahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak. Adapun capaian realisasi anggaran terkait dengan Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

1) Belanja Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak pada tahun 2024 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 43.652.819.872,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.428.949.533,- persentase sebesar 58,25%. Rendahnya capaian realisasi anggaran ini dikarenakan adanya defisit anggaran di Pemerintah Kabupaten Siak yang mengakibatkan beberapa pekerjaan secara fisik telah selesai dikerjakan namun belum dapat dibayarkan, sehingga pekerjaan yang belum dibayarkan di tahun anggaran 2024 akan dibayarkan di anggaran tahun 2025 sesuai dengan hasil revidi dari Inspektorat Daerah Siak.

secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.010.150.099,00,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 29.473.676.650,00,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 10.168.993.123,00,-

Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola Diskominfo Kabupaten Siak terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.16
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Realisasi Tahun 2024

Kode	Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	APBD	APBD-P	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=7/6
2.16.2.2 0.2.21.1 6.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika		100 Persen	100 Persen	100,00	35.814.344.280	43.652.819.872	25.428.949.533	58,25
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		100 Persen	100 Persen	100,00	35.814.344.280	43.652.819.872	25.428.949.533	58,25
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika		100 Persen	100 Persen	100,00	34.400.025.380	41.558.348.872	24.763.887.633	59,59
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100,00	10.435.875.580	11.121.180.372	9.354.648.579	84,12
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100 Persen	100 Persen	100,00	4.292.513.557	3.747.887.599	3.538.720.542	94,42
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	38 Orang	100,00	4.292.513.557	3.747.887.599	3.538.720.542	94,42
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100,00	13.450.000	15.850.000	0	0
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100,00	13.450.000	15.850.000	0	0
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum perangkat daerah yang dipenuhi	100 Persen	100 Persen	100,00	1.405.458.300	2.035.773.300	1.595.331.707	78,36
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	88,89	24.687.200	54.658.300,	20.453.000	37,42
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00	197.632.300	312.628.600,	272.385.200	87,13
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	107.686.800	143.034.400,	103.858.000	72,61
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Doku men	1 Doku men	100,00	25.460.000	25.460.000,	22.500.000	88,37
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Lapor	1 Lapor	90,10	1.049.992.000	1.499.992.000	1.176.135.507	78,41

Kode	Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	APBD	APBD-P	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=7/6
	Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	an	an					
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 Persen	100 Persen	100.00	249.934.323	819.243.423	223.909.949	27,33
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 Unit	54 Unit	100.00	99.999.223	244.912.423	87.074.949	35,55
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	100.00	149.935.100	574.331.000	136.835.000	23,83
2.16.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	100 Persen	100 Persen	100.00	3.672.022.900	3.679.035.400	3.487.411.990	94,79
2.16.01.2.07.06	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	89,47	24.428.800,	24.428.800	20.690.000	84,70
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	98,96	142.237.500	146.550.000	86.882.037	59,38
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	68,00	3.505.356.600	3.508.056.600	3.379.839.953	96,35
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	100.00	802.496.500	823.390.650,	509.274.391	61,85
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	100,00	677.944.000	651.548.150	464.724.391	71,33
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	87,14	124.552.500	171.842.500	44.550.000	25,92
2.16.01.2.09.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik	100 Persen	100 Persen	100,00	11.912.372.800	17.058.371.500	9.676.483.786	56,73
2.16.01.2.09.06	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya akses komunikasi dan informasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	100,00	11.912.372.800	17.058.371.500	9.676.483.786	56,73
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media	1 Doku	1 Doku	100,00	1.200.000.000	1.301.003.700	1.015.946.500	78,09

Kode	Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	APBD	APBD-P	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=7/6
		Komunikasi Publik	men	men					
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Layan an	6 Layan an	100,00	6.199.962.800	8.399.962.800,	7.201.892.000	85,74
2.16.02.2.01.07	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	35 Unit	35 Unit	100,00	4.512.410.000	7.357.405.000	1.458.645.286	19,83
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	100 Persen	100 Persen	100,00	12.051.777.000	13.378.797.000	5.732.755.268	42,85
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya nama domain dan jaringan intra Pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100,00	7.699.363.000	7.929.363.000	3.140.861.568	39,61
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 Unit	2 Unit	100,00	7.699.363.000	7.929.363.000	3.140.861.568	39,61
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	100,00	4.352.414.000	5.449.434.000	2.591.893.700	47,56
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah an Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	100,00	2.522.220.000	3.072.620.000	1.869.232.500	60,84
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Doku men	1 Doku men	100,00	248.800.000	378.800.000	2.591.893.700	32,76
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	20 Unit	20 Unit	100,00	219.050.000	260.670.000	0	0
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layan an	2 Layan an	100,00	43.900.000	43.900.000	0	0
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplement asikan sesuai dengan Masterplan Smart City	6 Doku men	6 Doku men	100,00	1.318.444.000	1.693.444.000	598.561.200	35,35
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Terselenggaranya statistik sektoral di	70 Persen	70 Persen	100,00	1.355.028.400	1.854.280.500	665.061.900	35,86

Kode	Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	APBD	APBD-P	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=7/6
	STATISTIK SEKTORAL	Lingkup Daerah Kab/Kota							
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	70 Persen	70 Persen	100.00	1.355.028.400	1.854.280.500	665.061.900	35,86
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00	1.355.028.400	1.854.280.500	665.061.900	35,86
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	58 Persen	58 Persen	100.00	59.290.500	240.190.500,00	0	0
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	58 Persen	58 Persen	100.00	59.290.500	240.190.500,00	0	0
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100.00	59.290.500	240.190.500,00	0	0
Jumlah Total						35.814.344.280	43.652.819.872	25.428.949.533	58,25

Tabel 28 - Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Realisasi Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah dan juga merupakan sebagai alat kendali, penilaian kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya *good governance*. Laporan kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik Tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Diskominfo Kabupaten Siak dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian penutup, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak tahun 2024 telah dapat dicapai kemudian beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan 100%. Hal ini merupakan catatan bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak untuk terus komitmen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Diskominfo Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Siak Sri Indrapura, 27 Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SIAK



ROMY LESMANA DERMAWAN, AP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740202 199303 1 004